



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024



www.dpmptsp.seruyan.go.id

dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

Jl. MT. Haryono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam Menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perizinan/nonperizinan dan penanaman modal serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kuala Pembuang, 27 Februari 2025

KEPALA DPMPTSP,



AGENG SETIAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19790920 199810 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap yang telah dilakukan selama tahun 2024. Dalam upaya merealisasikan Good governance, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2024-2026, **Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten adalah “Terwujudnya Penanaman Modal yang Sehat, Mandiri dan Pelayanan Perizinan yang Prima”**. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 3 (tiga) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan Strategis :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik(good governance);
2. Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian;

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah;
2. Meningkatnya realisasi investasi daerah;

Capaian kinerja sasaran (outcome) belum terlaksana sepenuhnya sampai 100 persen. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tujuan dan sasaran strategis dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Seruyan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan untuk masa yang akan datang. Melalui LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini diharapkan

dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	10
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.....	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Instansi	17
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	17
2. Membandingkan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu	19
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	23

4. Membandingkan Capaian Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024 dengan Standart Provinsi Maupun Nasional	23
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	24
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	29
8. Indikator Program, Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Anggaran dan Realisasi Anggaran	30
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	42
BAB IV. PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan	5
Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perubahan	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan	13
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2024	16
Tabel 3.2. Pengukuran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	17
Tabel 3.3. Perbandingan Data Kinerja	18
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi	18
Tabel 3.5. Perbandingan antara Capaian kinerja 2023 s/d 2024	18
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi tahun 2021,2022, 2023 dan 2024	19
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	23
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan Standar Nasional	23
Tabel 3.9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	24
Tabel 3.10. Perbandingan Data Kinerja	25
Tabel 3.11. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi Kinerja	26
Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 s/d 2024	26
Tabel 3.12.1 Nilai Investasi PMDN 2024	27
Tabel 3.12.2 Nilai Investasi PMA 2024	27

Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target Renstra	28
Tabel 3.14.	Ketersediaan SDM ASN	29
Tabel 3.15.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja	29
Tabel 3.16.	Perbandingan Program dan Realisasi Anggaran	30
Tabel 3.17.	Perbandingan Kegiatan dan Realisasi Anggaran	31
Tabel 3.18.	Perbandingan Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran	35
Tabel 3.19.	Perbandingan Program dan Realisasi Anggaran	41
Tabel 3.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024	43
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Tahun 2024	43
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Belanja DPMPSTSP Kab. Seruyan TA. 2024	44
Tabel 3.23	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran	49

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Grafik Perkembangan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas	19
Grafik 3.2. Grafik Perkembangan Nilai Investasi	28

BAB I

Bab I berisi :

1. *latar Belakang*
2. *Dasar Hukum*
3. *Isu Strategis*
4. *Struktur Organisasi*
5. *Sistematika LKjIP*

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP tahun 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainnya yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Renstra SOPD, RKPD/Renja SOPD, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 di dasarkan pada perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;

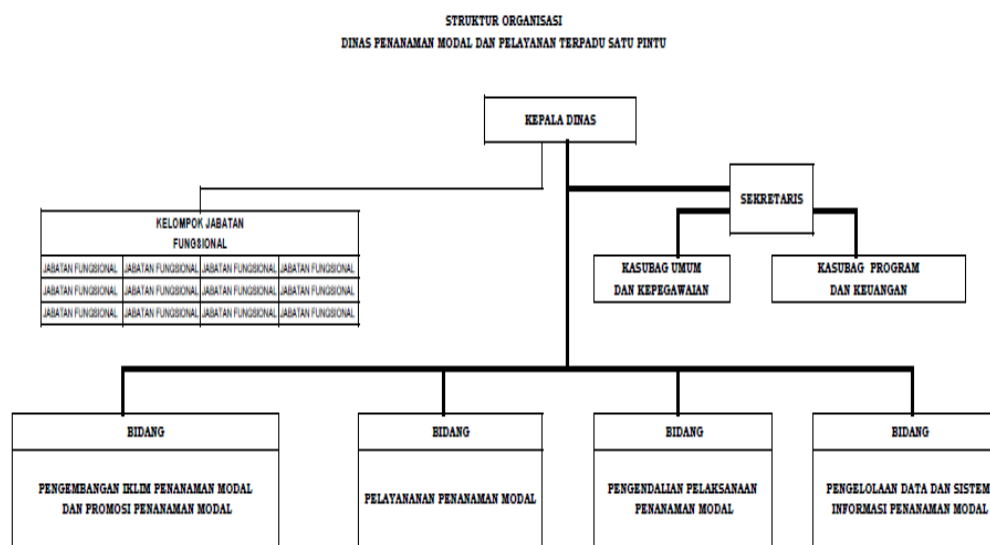
1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam isu strategis untuk menentukan arah

kebijakan dalam mengatasi permasalahan ataupun hambatan. Adapun permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan merupakan permasalahan yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual. Telaahan terhadap permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Belum optimal sarana dan prasarana gedung kantor dan ruang pelayanan kurang representatif;
2. Belum optimal sistem informasi promosi dan sistem informasi pelayanan yang belum berjalan secara maksimal;
3. Belum optimalnya perencanaan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum adanya data peluang investasi daerah, belum adanya data potensi unggulan daerah;
4. Belum optimal tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang di lakukan, belum optimalnya tindak lanjut persen pengeluaran tingkat masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui pengukuran secara rutin tingkat kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1.4 Struktur Organisasi DPMPSTP Kabupaten Seruyan



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS;
 2. SEKRETARIAT
 3. BIDANG - BIDANG, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal,
 - b. Bidang Pelayanan Penanaman Modal,
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - d. Bidang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman Modal daerah;
- 2) Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- 3) Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- 4) Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- 5) Perumusan kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- 6) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

- 7) Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia; dan
- 8) Pengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;

2. Sumber Daya Manusia DPMPTSP

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil beserta Tenaga Honorer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2024 berjumlah 63 orang. Berikut dijabarkan rincian PNS berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan serta tenaga honorer berdasarkan pendidikan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 Org
2.	Sekretaris Dinas	1 Org
3.	Kepala Bidang	4 Org
4.	Kepala Sub Bidang / Bagian	2 Org
5.	Fungsional Umum	21 Org
	JUMLAH	29 Org

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Org
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 Org

3.	Pembina	IV/a	6 Org
4.	Penata Tingkat I	III/d	5 Org
5.	Penata	III/c	3 Org
6.	Penata Muda TK I	III/b	- Org
7.	Penata	III/a	3 Org
8.	Pengatur TK I	II/d	6 Org
9.	Pengatur	II/c	3 Org
10.	Pengatur Muda TK I	II/b	1 Org
	JUMLAH		29 Org

Tabel 1.3.

Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana (S1)	5 Org
2.	Diploma Tiga (DIII)	5 Org
3.	SMA	21 Org
4.	SMP	2 Org
5.	SD	1 Org
	JUMLAH	34 Org

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

- b. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Dasar Hukum, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan, potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan

secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Di sajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN:

- Perjanjian Kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sebagai internal/fungsional Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai dengan rincian tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan dengan secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Seruyan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Aparatur bertanggung jawab secara berjenjang kepada Bupati Seruyan dengan prinsip dalam melaksanakan tugas berpegang terhadap kemandirian serta menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dapat bertindak objektif untuk mencapai hasil yang maksimal dan harus didukung oleh aparatur yang memiliki dedikasi yang akuntabel serta teruji di bidangnya (profesional).

I. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Penanaman Modal yang Sehat,Mandiri dan Pelayanan Perizinan yang Prima”.

II. Misi

1. Meningkatkan Kerjasama PMA dan PMDN yang kondusif dan menarik;
2. Meningkatkan potensi sumber daya daerah dan mempublikasikan melalui promosi peluang investasi;
3. Meningkatkan pelayanan investasi dan perizinan;
4. Meningkatkan sistem perencanaan informasi data penanaman modal dan perizinan;

III. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif,efisien dan akuntabel;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian;
4. Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian;

IV. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah;

2. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah;
3. Meningkatnya realisasi investasi daerah;
4. Meningkatnya realisasi investasi daerah ;

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERUYAN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE			KONDISI KINERJA AKHIR RENSTRA
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p style="text-align: center;"><i>Tujuan RPD</i></p> <p style="text-align: center;">1. Meningkatkan tata kelaola yang baik (<i>good governance</i>)</p> <p style="text-align: center;">2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan</p>									
<p style="text-align: center;"><i>Sasaran RPD</i></p> <p style="text-align: center;">1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah</p> <p style="text-align: center;">2. Meningkatkan produktifitas sektor perekonomian unggulan daerah</p>									
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Persentase pelaporan LHKPN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(B) 60,50	(B) 60,10	(BB) 70,20	(BB) 71,35	(BB) 71,35
2.	Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	88,13	90	91	92	92

V. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

VI. Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

VII. Sub Kegiatan

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik;
8. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Sub Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan;
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
11. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air, dan Listrik.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor;
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
19. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;
20. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
21. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
22. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
23. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;
24. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
26. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
27. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Rumus Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA : target PMDN dan PMA : 100%	Bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis yang ingin dicapai SKPD pada Tahun 2024 tertuang didalam Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024 :

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Program 2024	Kegiatan 2024
----	-------------------	-------------------	---------------------------	--------------	---------------

1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai sakip Perangkat Daerah	65,10 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	90%	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Program 2024	Kegiatan 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1.**Pengukuran Kinerja****Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,10 %
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	90 %

berdasarkan penetapan perubahan pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026 dan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, maka dalam penyusunan penetapan pengukuran perjanjian kinerja pada tahun 2024 mengalami perubahan pada indikator, tujuan maupun sasaran dengan uraian.

A. CAPAIAN KINERJA INSTANSI

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut adalah hasil pengukuran perjanjian kinerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yang telah dicapai tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Seruyan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,10	64,90	99,69%
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	90%	100%	100%

Sasaran ↔ 1 : ” Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah”

Adapun capaiannya sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.3.
Perbandingan Data Kinerja

Indikator Kinerja	Data awal Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,10	64,90	99,69%

$$\begin{aligned} \text{Prosentase Pencapaian Target} &= \frac{64,90}{65,10} \times 100 \% \\ &= 99,69 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.4.
Perbandingan Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori capaian
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,10	64,90	99,69%	Sangat Tinggi

$$\begin{aligned} \text{Prosentase Pencapaian Target} &= \frac{64,90}{65,10} \times 100 \% \\ &= 99,69 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2024 nilai SAKIP perangkat daerah yang telah di laksanakan dari RPJMD, sehingga capaian kinerjanya Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi 64,90 % dengan capaian kinerja 99,69%.

Tabel 3.5.
Perbandingan antara Capaian kinerja 2023 s/d 2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	-
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	99,69 %

Perbandingan prosentase penyelesaian perizinan yang diterbitkan yang memenuhi persyaratan sesuai SOP pada tahun 2024 dan 2023 telah mencapai sesuai dengan target yang ditentukan dan semakin meningkat dalam penyelesaian ketepatan proses perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.

2. Membandingkan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi tahun 2021,2022,2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			
		Th. 2021 (n-3)	Th. 2022 (n-2)	Th. 2023 (n-1)	Th. 2024 (n)
1.	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,72	90,66	90,82	-
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				64,90

Dari izin yang diterbitkan tersebut rata-rata yang dapat diselesaikan tepat waktu. Pada akhir periode RPJMD dapat terealisasi izin, Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang kualitas sesuai target yg telah ditentukan. pada Tahun 2021 permohonan izin yang diterbitkan sebanyak 87,72 dengan target 86%, pada tahun 2022 permohonan izin yang diterbitkan sebanyak 90,66% dari target 88%, pada tahun 2023 permohonan izin yang diterbitkan sebanyak 90,82% dari target 90%. Pada tahun 2024 mengalami perubahan pada Indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasi Perangkat daerah pada DPMPTSP sebesar 64,90 dari target 65,10.

1. Grafik perkembangan tahun 2024

3.1 Grafik

Pekembangan Capaian Realisasi Kinerja pada Tahun 2024



Pada Tahun 2024 jumlah nilai SAKIP yang di capai dari target 65,10 % terealisasi 64,50 % dengan capaian 99,07 %.

Beberapa gambar kegiatan DPMPTSP sebagai berikut :

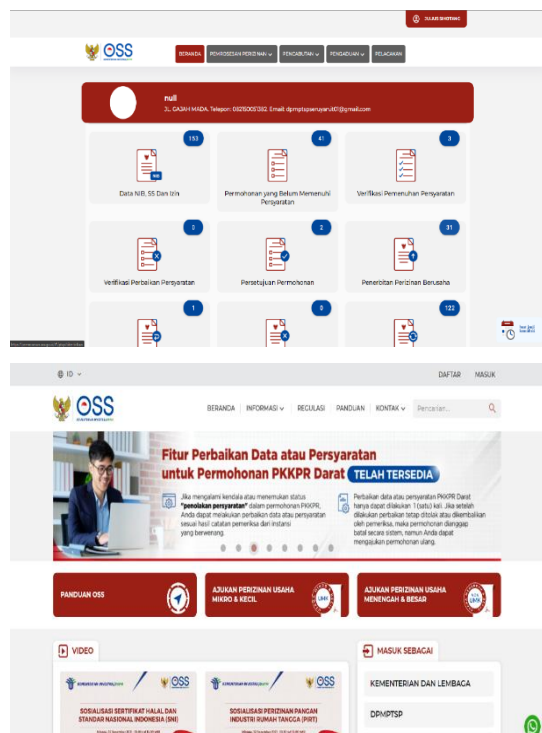


Sumber Data : Bidang Perizinan dan Non Perizinan

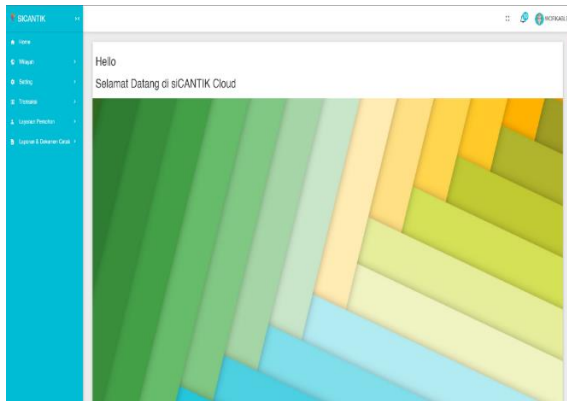
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang sedang Melayani Pemohon yang mengurus izin.

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dapat dilakukan secara offline maupun Online, Pelayanan Offline dapat dilakukan dengan tatap muka langsung dan pelayanan online pemohon bisa langsung mengakses aplikasi OSS dan Sicantik dengan link tautan Sebagai Berikut:

Beberapa Gambar Aplikasi OSS



Beberapa Gambar Aplikasi SICANTIK



Sumber Data:

pemohon izin yang memerlukan pengecekan lapangan dan bertambahnya jenis perizinan dan non perizinan yang ditangani/dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten seruyan sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yaitu diantaranya :

▪ **Sektor Kesehatan :**

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit
2. Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit
3. Izin Operasional Puskesmas
4. Izin Operasional Poliklinik
5. Izin Apotik
6. Izin Toko Obat
7. Izin Apoteker
8. Izin Optik
9. Izin Laboratorium
10. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
11. Izin Praktek Tenaga Farmasi
12. Izin Dokter
13. Izin Perawat
14. Izin Bidan

Sektor Informasi :

1. Izin Reklame / Spanduk
- **Sektor Perindustrian :**
 1. Izin Usaha Industri
 2. Tanda Daftar Industri
 3. IUI/IUI Menengah
 4. TDI/IUI Kecil
- **Sektor Perdagangan :**
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan
 2. Tanda Pendaftaran Waralaba
 3. Izin Usaha Toko Modern
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- **Sektor Pekerjaan umum dan Penataan Ruang :**
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
 3. Izin Penggunaan Air Permukaan
- **Sektor Lingkungan Hidup :**
 1. Izin Lingkungan
 2. Izin Pengelolaan Limbah B3
 3. Izin Land Aplication (LA)
 4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air (IPAL)
 5. Izin TPS LB3
- **Sektor Perikanan :**
 1. Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 2. Izin Budidaya Ikan (SIUP)
- **Sektor Perhubungan :**
 1. Izin Usaha Angkutan
 2. Retribusi Izin Trayek
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 6. Retribusi Terminal
 7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 8. Izin Dokumen Kapal
 9. Izin Masuk Pedalaman
 10. Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Sawit dan Turunannya

- 11.Rekomendasi Plat Kuning
- 12.Rekomendasi Ubah Warna

▪ **Sektor Pariwisata :**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

▪ **Sektor Tenaga Kerja :**

1. Izin LPTKS (Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta)
2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

▪ **Sektor Penanaman Modal :**

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
5. Izin Usaha Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

▪ **Sektor Penelitian :**

1. Rekomendasi Izin Penelitian
2. Rekomendasi Magang dan KKN

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.7.

Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,10	64,90	99,69%

Pada tahun 2024 nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 64,90%. Pada akhir periode RPJMD dapat terealisasi, Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dengan kualitas sesuai target yg telah ditentukan 65,10%.

4. Membandingkan Capaian Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024 dengan Standart Provinsi Maupun Nasional

Tabel 3.8.

Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi/Rata-rata Nasional
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,90	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.9.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal yang Dilakukan/Solusi
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,90	# Faktor Keberhasilan Telah dilakukan perbaikan dari tahun sebelumnya namun masih ada beberapa bentuk layanan yang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.	- Menindaklanjuti temuan hasil survey yang dilakukan perbaikan agar pelayanan publik menjadi lebih baik.
			# pemohon izin Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang melaksanakan /menerapkan memenuhi persyaratan sesuai SOP, dukungan anggaran untuk kegiatan pengecekan lapangan untuk	- memaksimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat agar tidak adanya keluhan dari pemohon izin, diperlukan sosialisasi yang intens untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat (dunia usaha)

				untuk memiliki IMB dan Izin serta non izin lain yang terkait.
--	--	--	--	---

Perbandingan Program sasaran 1 dan Realisasi Anggaran

Program Tahun 2024	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	116.188.000,00	108.681.314,00

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini penganggaran atau sumber daya keuangan pada sasaran 1 adalah kegiatan pemeriksaan lapangan dalam rangka proses penerbitan perizinan di tahun 2024 dari total pagu sebesar Rp. 116.188.000,00 terealisasi Rp. 108.681.314,00 Atau 93,53 % hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,47% dari pagu yang telah ditentukan.

Sasaran ↔ 2: ” Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah”

Adapun capaiannya sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.10.
Perbandingan Data Kinerja

Indikator Kinerja	Data awal Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	90%	100 %	100%

$$\begin{aligned}\text{Prosentase Pencapaian Target} &= \frac{100}{90} \times 100 \% \\ &= 100\end{aligned}$$

Tabel 3.11.

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target Kinerja dalam renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	90 %	100 %	100 %

$$\begin{aligned}\text{Prosentase Pencapaian Target} &= \frac{100}{90} \times 100 \% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Persentase Kesesuaian data administrasi untuk nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA di tahun 2024 ditargetkan 90 % dengan capaian 100 %. Realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2022 diambil dari sumber data LKPM online BKPM RI Target berjumlah Rp. 771.672.000.000,- dengan jumlah investasi dengan realisasi Rp. 1.089.807.751.947,- dari target 81 % nilai investasi nasional PMDN dan PMA di RPJMD Kabupaten Seruyan. Rekapitulasi LKPM ini berdasarkan Perusahaan PMDN dan PMA yang telah memiliki izin Penanaman Modal yang berlokasi di Kabupaten Seruyan, baik izin yang dikeluarkan BKPM RI, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan. Dari hasil tersebut capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Tabel 3.12.

Perbandingan Capaian Kinerja 2023 s/d 2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	100%	100%

Pada tahun 2024 realisasi nilai investasi PMDN dan PMA berdasarkan data perusahaan yang berinvestasi dengan nilai >Rp.500.000.000,00 wajib memiliki izin prinsip dan harus memiliki izin prinsip dan melaporkan kegiatannya melalui LKPM online dan tidak diakumulasi dengan tahun sebelumnya. Untuk realisasi investasi PMDN dari kontruksi dan produksi sebesar Rp. 658.775.807.050 dan realisasi investasi PMA dari Kontruksi dan produksi tahun 2024 sebesar Rp. 431.031.944.897 dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami Peningkatan dikarenakan data ditahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan perhitungan manual berdasarkan data SIUP Perusahaan yang dikeluarkan DPMPSTSP Kabupaten Seruyan dan LKPM PMA/PMDN. Dibawah ini adalah Rekapitulasi Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagai berikut :

NILAI INVESTASI PMDN DAN PMA KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 3.12.1

Nilai Investasi PMDN 2024

No	PELAPORAN LKPM	NILAI INVESTASI (Rp. Juta)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Triwulan I	120.557.000.000	
2	Triwulan II	148.904.800.000	
3	Triwulan III	160.145.500.000	
4	Triwulan IV	229.168.507.050	
	JUMLAH	658.775.807.050	

Tabel 3.12.2

Nilai Investasi PMA 2024

No	PELAPORAN LKPM	NILAI INVESTASI (Rp. Juta)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Triwulan I	95.658.000.000	
2	Triwulan II	79.396.650.000	
3	Triwulan III	64.753.000.000	

4	Triwulan IV	191.224.294.897	
	JUMLAH	431.031.944.897	

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten Seruyan

Tabel 3.13.

Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Renstra Tahun 2024
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	100%	90 %

Partisipasi perusahaan dalam berinvestasi diharapkan mendukung kemajuan perkembangan Kabupaten Seruyan, Realisasi pada tahun 2024 mencapai 100% dari target yang ditetapkan 90%.

Berdasarkan capaian target Nilai Investasi PMA/PMDN 90% yang terdapat di RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan 2024 - 2026 maka realisasi pada tahun 2024 Rp. 1.089.807.751.947 sebesar 100 %.

3. Grafik perkembangan tahun 2024

3.2. Grafik

Perkembangan Nilai Investasi



Berdasarkan target capaian nilai investasi PMA/PMDN tiga tahun pada RPJMD, pada tahun 2024 nilai investasi target 90 realisasi sebesar 100% dengan capaian 100 %

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 , sehingga analisis penggunaan sumber daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sudah efisien.

Tabel 3.14.

Ketersediaan SDM ASN

No	SKPD	Ketersediaan SDM ASN	Kebutuhan SDM ASN
1.	DPMPTSP	29	26

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.15.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program	Analisa
1.	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	1. Program pengembangan iklim penanaman modal	Program yang berpengaruh terhadap pencapaian Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA pada DPMPTSP
		2. Program promosi penanaman modal	
		3. Program Pelayanan Penanaman modal	
		4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	

Kegagalan/Keberhasilan pencapaian sasaran 2 “Terciptanya perkembangan iklim investasi yang kondusif” tidak terlepas dari dilaksanakannya program yang mendukung sasaran yaitu : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang operasionalnya didukung oleh kegiatan pemeriksaan lapangan, pengawasan kepada pelaku usaha.

8. Indikator Program, Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Anggaran dan Realisasi Anggaran

Tabel 3.16.

Perbandingan Program dan Realisasi Anggaran

Program Tahun 2024	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	5.756.436.843,00	5.685.960.259,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal	100%	41.742.000,00	36.997.600,00
Program Promosi Penanaman Modal	Rasio potensi dan peluang investasi yang dipromosikan	2 KK	110.663.000,00	83.082.500,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin SOP dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	615.478.000,00	565.674.310,00

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan pengendalian PMA dan PMDN Penanaman Modal	100%	615.478.000,00	565.674.310,00
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Informasi layanan perizinan secara elektronik dan non elektronik yang disampaikan kepada pelaku usaha	100%	109.799.500,00	102.838.134,00

Tabel 3.17.
Perbandingan Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Kegiatan Tahun 2024	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	60 Laporan	24.300.000,00	24.300.000,00

	disusun dan dilaporkan tepat waktu			
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	14 Bulan	3.756.738.726,00	3.738.900.128,00
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di selesaikan	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	8 Jenis	289.693.000,00	287.368.366,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat	100%	827.258.600,00	796.138.552,00

	daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	1600 Laporan	654.156.434,00	639.062.830,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang diperbaiki	37 Unit	204.290.083,00	200.190.383,00
Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif penanaman modal kewenangan daerah yang diberikan	1 Dokumen	17.627.000,00	14.748.400,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Potensi Investasi Kabupaten	1 Dokumen	24.115.000,00	22.249.200,00

	yang terpetakan			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi daerah penanaman modal provinsi atau nasional	2 KK	110.663.000,00	83.082.500,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan yang menjadi kewenangan daerah yang diterbitkan	8 Dokumen	116.188.000,00	108.681.314,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	8 Pelaku Usaha	615.478.000,00	565.674.310,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	Jumlah jenis layanan data dan informasi		109.799.500,00	102.838.134,00

Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perizinan dan non perizinan terintegrasi yang dikelola pada tingkat kabupaten	2 Dokumen		
--	---	-----------	--	--

Tabel 3.18.

Perbandingan Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Sub Kegiatan Tahun 2024	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	60 laporan	24.300.000,00	24.300.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3.728.505.720,00	3.713.667.128,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	60 laporan	28.233.000,00	25.233.000,00
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	5 Paket	111.210.000,00	111.210.000,00

Kelengkapannya	kelengkapan			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	20 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	26 Orang	176.983.000,00	174.658.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	30 Paket	12.199.000,00	12.147.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Paket	304.996.150,00	301.679.558,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	117.661.850,00	114.527.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	47.715.700,00	27.067.630,00
Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan	7 Dokumen	14.850.000,00	14.740.000,00

dan Peraturan Perundang – undangan	peraturan perundang-undangan yang disediakan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	31.565.900,00	31.369.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	295.270.000,00	294.608.364,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1500 laporan	9.535.000,00	9.180.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	5 Laporan	98.772.500,00	88.486.190,00
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	545.848.934,00	541.396.640,00
Penyediaan jasa	Jumlah kendaraan	20 Unit	113.435.800,00	109.749.100,00

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	20.150.000,00	19.781.000,00
Pemeliharaan/Re habilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi	2 Unit	70.704.283,00	70.660.283,00
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha penanaman modal	Jumlah Peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	17.627.000,00	14.748.400,00
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 Dokumen	24.115.000,00	22.249.200,00

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 Dokumen	110.663.000,00	83.082.500,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen	28.102.000,00	23.927.600,00
Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2000 Pelaku Usaha	44.103.000,00	42.712.954,00
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	2 Kegiatan Usaha	44.073.000,00	42.040.760,00

	risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha			
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang diHadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	92.321.000,00	92.170.100,00
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	338.514.000,00	307.355.950,00
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan	15 Kegiatan Usaha	184.643.000,00	166.148.260,00

	Usaha dari Pelaku dilakukan inspeksi:serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha			
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	109.799.500,00	102.838.134,00

Penurunan capaian indikator kinerja ini dikarenakan pengembangan potensi-potensi unggulan daerah di Kabupaten Seruyan belum terlalu terpromosikan secara intens dengan demikian masyarakat lokal maupun pendatang sebagian besar belum berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Seruyan. Langkah-langkah alternative solusi adalah semakin intens melakukan promosi investasi atau mengikuti pameran-pameran di dalam daerah maupun diluar daerah untuk meningkatkan investor di Kabupaten Seruyan dan dilakukan kerjasama promosi dan potensi investasi antar daerah.

9. Indikator Program, target, realisasi, anggaran dan realisasi anggaran

Tabel 3.19.

Perbandingan Program dan Realisasi Anggaran

Program Tahun 2024	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Promosi Penanaman Modal	Rasio potensi dan peluang investasi yang di promosikan	90 %	75,07%	Rp. 110.663.000,-	Rp. 83.082.500,-

Dengan membandingkan antara prosentase capaian kinerja pada Tahun 2024 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan **Program Promosi Penanaman Modal** dan didukung oleh Satu Kegiatan sudah mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran. Total pagu sebesar Rp. 110.663.000,- terealisasinya Rp. 83.082.500,-

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2024 dibiayai dari Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dituangkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024. Total Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan **Tahun 2024 sebesar Rp. 6.750.307.343,-** dengan alokasi anggaran **Belanja Operasi Rp. 6.552.298.343,-** dan Anggaran **Belanja Modal sebesar Rp. 198.009.000,-**

1. Realisasi Anggaran Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Pada tahun anggaran 2024.

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sebesar **Rp. 6.552.298.343,-** dimana Anggaran Belanja Operasi dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .3.20.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Tahun 2024			
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih Lebih Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai	3.855.486.726,-	3.840.548.128,-	99,61	14.938.598,-

2. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Jasa terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan melaksanakan 6 (Enam) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan dengan dana APBD sebesar **Rp. 2.696.811.617,-** realisasi sebesar **2.546.950.959,- atau 94,44%**

Berikut kesimpulan atau ringkasan Capaian Kinerja Sasaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan tahun 2024, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis :

Tabel 3.21.

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatk	Nilai SAKIP	Program	Rp. 116.188.000,-	Rp. 108.681.314,-

	an Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Pelayanan Penanaman Modal		
			Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 109.799.500,-	Rp. 102.838.134,-
2.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 110.663.000,-	Rp. 83.082.500,-
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 615.478.000,-	Rp. 565.674.310,-

Berikut rincian realisasi keuangan/anggaran DPMPTSP Kab. Seruyan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan program/kegiatan/belanja keuangan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.22.

Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kab. Seruyan TA. 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD (BL + BTL) (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
1	2	3	4	5
I	BELANJA DAERAH	6.750.307.343,00	6.583.234.087,00	97,52
II	BELANJA OPERASI	6.552.298.343,00	6.387.499.087,00	97,48

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.756.436.843,00	5.685.960.259,00	98,77
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.300.000,00	24.300.000,00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.300.000,00	24.300.000,00	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.756.738.726,00	3.738.900.128,00	99,52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.728.505.720,00	3.713.667.128,00	99,60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.233.000,00	25.233.000,00	89,37
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289.693.000,00	287.368.366,00	99,19
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.210.000,00	111.210.000,00	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.983.000,00	174.658.000,00	98,68
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	827.258.600,00	796.138.552,00	96,23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.199.000,00	12.147.000,00	99,57
	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	304.996.150,00	301.679.558,00	98,91
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.661.850,00	114.527.000,00	97,33

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.715.700,00	27.067.630,00	56,72
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.850.000,00	14.740.000,00	99,25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.565.900,00	31.369.000,00	99,37
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.270.000,00	294.608.364,00	99,77
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000,00	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654.156.434,00	639.062.830,00	97,69
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.535.000,00	9.180.000,00	96,27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	98.772.500,00	88.486.190,00	89,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.848.934,00	541.396.640,00	99,18
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.290.083,00	200.190.383,00	97,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.435.800,00	109.749.100,00	96,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.150.000,00	19.781.000,00	98,16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.704.283,00	70.660.283,00	99,93

2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	41.742.000,00	36.997.600,00	88,63
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.627.000,00	14.748.400,00	83,66
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.627.000,00	14.748.400,00	83,66
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.115.000,00	22.249.200,00	92,26
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.115.000,00	22.249.200,00	92,26
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	110.663.000,00	83.082.500,00	75,07
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	110.663.000,00	83.082.500,00	75,07
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.663.000,00	83.082.500,00	75,07
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	615.478.000,00	565.674.310,00	93,53
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	116.188.000,00	108.681.314,00	93,53
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha	28.102.000,00	23.927.600,00	85,14

	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	44.103.000,00	42.712.954,00	96,84
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	44.073.000,00	42.040.760,00	95,38
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	615.478.000,00	565.674.310,00	91,90
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	615.478.000,00	565.674.310,00	91,90
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	92.321.000,00	92.170.100,00	99,83
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	338.514.000,00	307.355.950,00	90,79
	Pengawasan Penanaman Modal	184.643.000,00	166.148.260,00	90,16
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SITEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109.799.500,00	102.838.134,00	93,66
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.799.500,00	102.838.134,00	93,66
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	109.799.500,00	102.838.134,00	93,66

	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
--	---	--	--	--

Tabel 3.23.

Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran
1.	Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA	100,00%	97,52%

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : “Terwujudnya Penanaman Modal yang Sehat, Mandiri dan Pelayanan Perizinan yang Prima” “ sangatlah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak (stakeholders) dan dalam penerapan Standart Pelayanan Publik (SPP).
2. Inovasi pemberian pelayanan perizinan dalam rangka memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perijinan yaitu :
 - a. Pelayanan yang langsung kepemohon dan waktu penyelesaiannya 3 (tiga) hari kerja dan gratis.
 - b. Penyederhanaan persyaratan perizinan melalui Pelayanan Paket Perijinan secara Online.
3. Keberhasilan capaian indikator kinerja lama proses perizinan dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang melaksanakan /menerapkan memenuhi persyaratan sesuai SOP, sehingga capaian kinerjanya setiap lama proses izin yang diterbitkan terealisasi 100 %.

Untuk tetap mempertahankan nilai investasi secara optimal Pemerintah Kabupaten Seruyan akan tetap melakukan upaya pemberlakuan Perda RTRWK sesuai dengan RDTRK, sehingga ada kepastian peruntukkan investasi sesuai dengan bidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang melakukan kegiatan usaha untuk mengurus legalitas izin usahanya melalui sosialisasi. Meningkatkan promosi investasi melalui pameran investasi, pameran pelayanan publik, leaflet, baleho, media elektronik dan situs DPMPSTSP Kabupaten Seruyan (www.dpmptsp.seruyankab.go.id) dan situs Pemerintah Kabupaten Seruyan (www.seruyankab.go.id). Diharapkan tahun yang akan datang kemudahan pelayanan perizinan dengan pemberlakuan paket perizinan online dapat terlaksana sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perizinan. Uraian diatas disampaikan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu : perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur DPMPSTSP Kabupaten Seruyan sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing secara berkelanjutan, Mengintensifkan fungsi koordinasi, komunikasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Optimalisasi paket perizinan online, dan tanda tangan elektronik sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya pengembangan pelayanan perizinan berbasis sistem online dan paralel secara bertahap, sehingga efisien dan akumulasi database terukur. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perizinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Seruyan. Pelimpahan kewenangan perizinan yang bersifat administrasi dan paralel serta ada keterkaitan dengan izin- izin lainnya yang masih tersebar di SKPD-SKPD teknis. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap.

Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Kuala Pembuang, 27 Februari 2025

KEPALA DPMPSTSP,



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19790920 199810 1 001